

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN AKSES  
JALAN PELABUHAN TELUK TAPANG DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**TESIS**



**Oleh:**  
**REVI YULIANA**  
**NPM. 2210018312007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN AKSES  
JALAN PELABUHAN TELUK TAPANG DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

**TESIS**

*Tesis Ini Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Teknik Sipil*



**Disusun Oleh :**

**REVI YULIANA**  
**NPM. 2210018312007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN AKSES  
JALAN PELABUHAN TELUK TAPANG DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

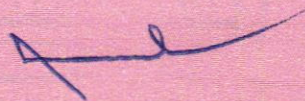
Oleh :

**REVI YULIANA**  
**NPM. 2210018312007**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 5 Agustus 2024

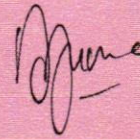
Menyetujui :

Pembimbing I



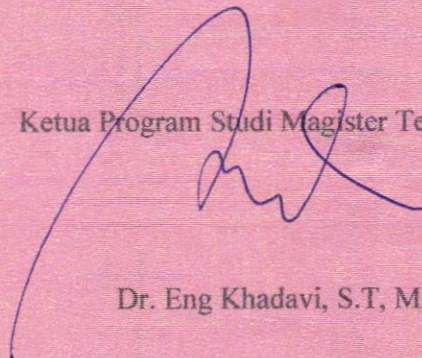
Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc

Pembimbing II



Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE

Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil



Dr. Eng Khadavi, S.T, M.T

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN  
KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN AKSES  
JALAN PELABUHAN TELUK TAPANG DI KABUPATEN  
PASAMAN BARAT**

Oleh :

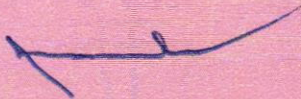
**REVI YULIANA**

**NPM. 2210018312007**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 5 Agustus 2024

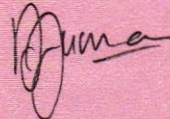
Tim Penguji :

KETUA



Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc

SEKRETARIS



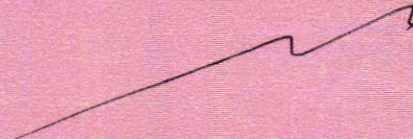
Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T, MSCE

ANGGOTA



Dr. Ir. Lusi Utama, M.T

ANGGOTA



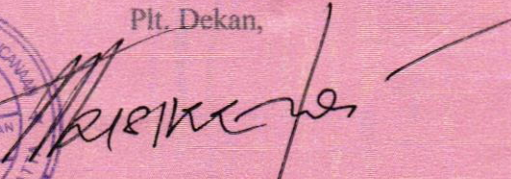
Dr. Ir. Eva Rita, M.Eng

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Magister Teknik Sipil

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Plt. Dekan,



  
Dr. Al Busyra Fuadi, S.T. M.Sc

**ABSTRAK**

Perkembangan dunia industri bidang konstruksi di Indonesia saat ini semakin pesat. Namun perbaikan pengelolaan kegiatan konstruksi dengan meminimalkan risiko kecelakaan konstruksi tidak sejalan dengan perbaikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sumbar Riau mencatat sebanyak 31.801 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2021 dimana 216 kasus kecelakaan pekerja jasa konstruksi sebagian besar terjadi di lokasi tempat kerja. Hal ini disebabkan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek konstruksi masih sering diabaikan, dimana proyek konstruksi merupakan sektor industri yang memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan SMKK pada tahap Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi, Tahap pemilihan Penyedia Jasa dan tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi serta menentukan faktor-faktor penghambat penerapan SMKK tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengevaluasi dokumen SMKK serta melakukan wawancara terhadap 11 orang informan terdiri dari pihak PPK Perencana, PPK Pelaksana, PPK Pengawasan, Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Pokja Pemilihan. Tujuan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan SMKK. Hasil penelitian didapatkan penerapan tahap Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi dengan tingkat penilaian kurang karena tidak adanya dokumen Rancangan Konseptual SMKK pada saat perancangan konstruksi, tahap Pemilihan Penyedia Jasa kategori memuaskan (100%) kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan tahap Pelaksanaan Pembangunan kategori memuaskan (86,94%) kelengkapan dokumen dan kategori baik (75,38 %) kesesuaian dokumen. Untuk faktor-faktor penghambat didapatkan 4 (empat) faktor penghambat penerapan SMKK yaitu kurangnya pengetahuan pekerja akan pentingnya mengutamakan keselamatan dalam bekerja, Personel HSE Konsultan Pengawas jarang ditempatkan sampai akhir pekerjaan karena keterbatasan biaya, Top Manajemen belum melakukan pengawasan yang ketat, dan setelah dilaksanakan audit internal perubahan yang diharapkan tidak tercapai serta hasil dari audit tersebut ternyata tidak memberikan peningkatan yang signifikan atau memuaskan. Solusi yang direkomendasikan pekerjaan perancangan konstruksi Penyedia Jasa Konsultasi harus menyusun Rancangan Konseptual SMKK, menyusun biaya penerapan SMKK untuk penyedia jasa yang memberikan layanan Konsultasi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi Pengawasan, menyesuaikan persentase biaya terhadap pekerjaan konstruksi berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan mengacu kepada Permen PUPR Nomor 10 tahun 2021, dan melakukan sosialisasi/pelatihan tentang SMKK kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

**Kata Kunci** : Faktor Penghambat, Kecelakaan Konstruksi, Proyek Konstruksi, Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021, SMKK

**ABSTRACT**

*The construction industry in Indonesia is experiencing rapid growth, yet the improvement in construction project management to minimize construction accidents is not commensurate with the expansion. According to data from the Social Security Administration for Manpower in Sumatra and Riau, there were 31,801 workplace accidents in 2021, with 216 cases involving construction workers, predominantly occurring at job sites. This is largely attributed to the frequent neglect of implementing the Construction Safety Management System (SMKK) on construction projects, which inherently pose high risks and accident rates.. The objective of this research is to evaluate the implementation of the SMKK at the stage of Conceptual Design of SMKK Construction Planning, the Stage of Selection of Service Providers and the stages of Implementation of Construction Works, as well as to determine the factors inhibiting the application of SMK Construction Work Implementation Stage on the basis of The Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021. A qualitative descriptive method was employed, involving interviews with 11 key informants including Commitment Making Official of planner, Commitment Making Official of execution, Commitment Making Official of supervisor, Consultant of Planner, Contractor of construction, Consultant of Inspection and tender committee. The objective of the interview is to identify the obstacles in the implementation of the SMKK. The results of the research are obtained the application of the Conceptual Design Stage of SMKK Construction Design with less assessment rate due to the absence of the conceptual design document of SMK at the time of construction, the Selection of the Service Provider Stage satisfactory (100%) completeness and compatibility of the document and the Implementation stage of the Development category satisfactory (86.94%) complete document and good category (75.38%) conformity of document. The study identified four main barriers: inadequate awareness among workers regarding safety priorities, infrequent presence of HSE personnel from consulting supervisors until project completion, lax oversight by Top Management, and ineffective outcomes following internal audits, failing to achieve expected improvements. Solution Recommended Construction Planning Work Consulting Service Provider should prepare the SMKK Conceptual Plan, compile the cost of implementation of SMKK for service providers providing Construction Maintenance Management Consulting and Construction Consulting Oversight services, adjust the percentage of cost to construction work according to the applicable legislation and reference to The Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 10 of 2021, and conduct socialization/training on SMKK to Service Users and Service Providers.*

**Keywords:** *Inhibiting Factor, Construction Accident, Construction Project, Inhibiting Factor, SMKK, The Ministry of Public Works and Housing Regulation No. 10 Year 2021*

**DAFTAR ISI**

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Batasan Masalah .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Proyek Konstruksi.....	7
2.2 Standar Peraturan atau Perundang-Undangan dan Ketentuan K3 .....	9
2.3 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) .....	14

2.4	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 .....	17
2.4.1	Rancangan Konseptual SMKK .....	18
2.4.2	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) .....	18
2.4.3	Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu .....	20
2.4.4	Rencana Kerja Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) .....	21
2.4.5	Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) .....	22
2.4.6	Penerapan SMKK Tahap Pembangunan .....	22
2.5	Komponen Kegiatan Penerapan SMKK .....	25
2.5.1	Risiko Keselamatan Konstruksi .....	25
2.5.2	Unit Keselamatan Konstruksi .....	26
2.5.3	Biaya Penerapan SMKK .....	27
2.6	Evaluasi Penerapan SMKK pada Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi, Tahap Pemilihan Penyedia Jasa dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi menurut Permen PUPR RI Nomor 10 Tahun 2021 .....	28
2.6.1	Evaluasi Penerapan SMKK pada Rancangan konseptual SMKK Perancangan Konstruksi .....	28
2.6.2	Evaluasi Penerapan SMKK pada Tahap Pemilihan Penyedia Jasa .....	29
2.6.3	Evaluasi Penerapan SMKK pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi .....	32
2.7	Penelitian Terdahulu .....	63
2.8	Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi .....	67
BAB 3	METODE PENELITIAN .....	73
3.1	Pendahuluan .....	73



3.2	Pendekatan Penelitian .....	73
3.3	Lokasi Penelitian.....	74
3.4	Tahapan Penelitian.....	75
3.5	Populasi dan Sampel .....	76
3.6	Pengumpulan Data .....	76
	3.6.1 Pengumpulan Data Tujuan Pertama dan Kedua.....	76
	3.6.2 Pengumpulan Data Tujuan Ketiga .....	79
3.7	Instrumen Penelitian .....	79
3.8	Teknik Analisa Data .....	89
	3.8.1 Analisa Data Tujuan Pertama .....	89
	3.8.2 Analisa Data Tujuan Kedua .....	90
	3.8.3 Analisa Untuk Tujuan Ketiga .....	91
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>92</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	92
	4.1.1 Penerapan SMKK pada Tahapan Rancangan Konseptual SMKK.....	92
	4.1.2 Penerapan SMKK pada Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa .....	97
	4.1.3 Penerapan SMKK pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan....	103
	4.1.4 Faktor-faktor Penghambat dalam Penerapan SMKK .....	148
4.2	Pembahasan.....	157
	4.2.1 Penerapan SMKK pada Tahap Rancangan Konseptual SMKK Perancangan Konstruksi .....	157
	4.2.2 Penerapan SMKK pada Tahap Pemilihan Penyedia Jasa .....	159
	4.2.3 Penerapan SMKK pada tahap pelaksanaan Pembangunan.....	162
	4.2.4 Faktor-faktor penghambat dalam penerapan SMKK .....	166
	4.2.5 Solusi yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi .....	171
<b>BAB 5</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>172</b>
5.1	Kesimpulan .....	172

5.2	Saran .....	174
	DAFTAR PUSTAKA .....	175
	LAMPIRAN .....	184
	PERTANYAAN WAWANCARA .....	187
	VALIDASI AHLI/PAKAR.....	192
	DOKUMENTASI .....	201

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan dunia industri di bidang konstruksi di Indonesia saat ini semakin pesat. Namun perbaikan pengelolaan kegiatan konstruksi dengan meminimalkan risiko kecelakaan konstruksi tidak sejalan dengan perbaikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada (Sulistiawati et al., 2022). Namun pada kenyataannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara umum masih sering terabaikan. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja.

Hal ini Sesuai dengan Data yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 265.334 kasus pada 2022 terjadi kecelakaan kerja di Indonesia dimana Jumlah tersebut mengalami naik 13,26% dari tahun 2021 tercatat sebanyak 234.270 kasus (Pratiwi , 2023). Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun.

Berdasarkan data BPJS (BPJS Ketenagakerjaan, 2020) terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 23.313 pada wilayah Sumatera Barat, sedangkan di Kota Padang tahun 2020 tercatat adanya kasus kecelakaan kerja yakni sebanyak 1.597 orang (Hikmi, 2022). Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Sumbar Riau mencatat sebanyak 31.801 kasus kecelakaan kerja terjadi di wilayahnya sepanjang tahun 2021. Dari data kami sebagian besar kecelakaan atau sebanyak 31.113 kasus kecelakaan dialami oleh pekerja penerima upah (PPU), disusul 472 kasus pekerja bukan penerima upah (BPU), dan 216 kasus kecelakaan pekerja jasa konstruksi. sebagian besar kecelakaan kerja yang terjadi, lokasi kejadiannya berada di tempat kerja. (Gunawan, 2022).

Menurut (Manik, 2022), kecelakaan konstruksi yang terjadi pada periode tahun 2017 s/d tahun 2021 sebanyak 54 kasus diantaranya kecelakaan konstruksi yang terjadi pada proyek jalan yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017 terjadi peristiwa Jatuhnya crane (Tol Bogor Outer Ring Road/BORR) dan tanggal 30 Desember 2017 Beton girder runtuh (Jalan Tol Pematang-Batang). Pada tanggal 20 Februari

2018 Jatuhnya bekesting *pier head* PCB 34 (Proyek Tol Becakayu) dan Runtuhnya Pengecoran In Situ Slab Proyek Jalan Tol Manado-Bitung terjadi pada tanggal 17 April 2018. Untuk tahun 2019 terjadi peristiwa Jatuhnya besi siku pada Proyek Pembangunan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung dan tanggal 16 Agustus Tergulingnya Girder saat pengangkutan pada proyek Pembangunan Tol Cisumdawu. Selanjutnya Terlepasnya *boom service* di tol Trans Sumatera seksi 4B pada tanggal 10 Februari dan tanggal 1 Juni 2021 Amblasnya Jalan Detour di Jalan Nasional Ruas Jalan Padalarang-Purwakarta terdampak Pembangunan Terowongan 8 Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan Runtuhnya *Launcher Girder* pada Proyek Tol Cibitung-Cilincing Seksi 2 STA 19+000 pada tanggal 5 November 2021.

Menurut Reski et al. (2022) Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan dan Pembangunan Sarana Umum Mapolres Kuburaya belum optimal dibandingkan dengan pengaturan yang ditetapkan. Mayoritas pekerja meyakini bahwa kontraktor selaku pelaksana proyek telah menerapkan seluruh unsur sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam proyek ini. Putra dan Sararwati (2023) berpendapat proyek konstruksi merupakan sektor industri yang memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja, karena rendahnya kesadaran begitu pentingnya melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Selama ini penerapan K3 pada suatu proyek konstruksi dianggap menjadi beban biaya, bukan merupakan suatu mencegah terjadinya kecelakaan kerja namun dapat memberikan tingkat kerugian dari proyek konstruksi itu sendiri. Begitu pentingnya penerapan K3 pada sektor konstruksi di Indonesia, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan penerapan K3 dalam Undang-Undang serta kewajiban dalam pelaksanaannya disemua sektor industri konstruksi.

Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Bab I Pasal 1 ayat 3 menyatakan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ayat 3 menyatakan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya

Keselamatan Konstruksi. Kemudian Ayat 4 menyatakan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pasal 2 ayat 1 Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.

Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu proyek konstruksi yang memiliki risiko Keselamatan Konstruksi besar. Dimana Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sebesar Rp. 233.992.660.000 (Dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih kurang 142 orang dan adanya pekerjaan galian batu dengan peledakan (*blasting*). Sesuai dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 BAB III bagian kedua pasal 34 ayat 5 menyatakan Risiko Keselamatan Konstruksi besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (i). bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian tingkat risiko dalam RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; (ii). Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); (iii). mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang; (iv). menggunakan peralatan berupa pesawat angkat; (v). menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau (vi). Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.

Berdasarkan data yang didapat dari laporan kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat periode November 2023 terdapat 19 kejadian *nearmiss* tetapi tidak menimbulkan kecelakaan kerja baik ringan, sedang ataupun berat. *Nearmiss* (nyaris celaka) merupakan nyaris kecelakaan yang nyaris / hampir tidak bisa dihindari tetapi harus tetap dilaporkan. Pelaporan *nearmiss* merupakan upaya untuk mencegah kecelakaan kerja karena pelaporan *nearmiss* memberikan informasi tentang faktor penyebab dan akar penyebab dari kecelakaan kerja.

Adanya kejadian nearmiss disebabkan oleh keteledoran dari para pekerja (faktor manusia)itu sendiri, sedangkan untuk rambu-rambu dan spanduk sudah ditempatkan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. Terbaikannya penerapan SMKK pada proyek konstruksi dapat menyebabkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan Keselamatan Konstruksi yang berlaku.

Berdasarkan gambaran diatas peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat”.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Konstruksi Pembangunan Jalan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut yaitu :

1. Mengevaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Mengetahui faktor Penghambat dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Menemukan solusi yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Konstruksi Pembangunan Jalan.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil baik demi tercapainya tujuan dari kegiatan penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan masalah atau lingkup yang akan diuraikan dalam pembahasan dengan batasan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian dilakukan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang difokuskan pada Rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada tahap pembangunan yaitu pada tahapan pemilihan Penyedia Jasa dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
2. Data yang dikumpulkan merupakan data yang diambil dari beberapa informan yang mempunyai pengetahuan dan mempunyai peran serta wewenang terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat Pihak yang terkait diantaranya PPK, Konsultan Perencana, Kelompok Kerja Pemilihan, Kontraktor, Konsultan pengawas.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Badan Usaha (Perusahaan) atau perorangan dalam melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada

proyek konstruksi teknik sipil dalam pencegahan kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi.

2. Kegiatan penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam bidang pendidikan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek konstruksi teknik sipil.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini yaitu;

- Bab 1. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan Sistematika penulisan.
- Bab 2. Tinjauan Pustaka, menjelaskan Landasan Teori, berisi tinjauan pustaka yang didapat dari berbagai penelitian dan sumber buku atau referensi yang menjadi rujukan atau pembanding yang berkaitan dengan penerapan SMKK dan menjadi arahan dalam menyelesaikan masalah.
- Bab 3. Metode Penelitian, menjelaskan mengenai metode penelitian, langkah-langkah penelitian, bagan alir penelitian, dan pengumpulan data serta teknik analisa data.
- Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian berdasarkan pada pertanyaan dalam bentuk wawancara mendalam yang disebarkan kepada informan.
- Bab 5. Kesimpulan dan Saran, menjelaskan rangkuman yang didapat dari hasil pembahasan tesis dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian.